

PERHEPI E-NEWS ini difungsikan sebagai sarana media komunikasi internal PERHEPI serta jejaring PERHEPI. Dijadwalkan terbit secara berkala setiap bulan. PERHEPI E-NEWS berisi berita seputar kegiatan PERHEPI serta agenda kegiatan ke depan. Pengelola E-NEWS menerima sumbangan tulisan yang berkaitan dengan kegiatan PERHEPI di seluruh Indonesia. Surat menyurat dan komunikasi seputar berita PERHEPI dapat melalui: perhepi.news@gmail.com

1 Sekapur Sirih

Salam PERHEPI

Selamat berjumpa kembali dengan e-news edisi khusus koperasi yang sampai ke hadapan para pembaca sekalian.

Mengisi edisi kali ini artikel mengenai Kewirausahaan Koperasi Pertanian, Membangkitkan peran koperasi dan Revitalisasi Bulog. Tidak ketinggalan berita mengenai Koperasi yang memiliki lambang baru, PERHEPI dan BPS Tandatangani MoU Kegiatan Sensus Pertanian 2013, Kegiatan Rapat Koordinasi KOMDA Surakarta, Indonesia yang menjadi tuan rumah Hari Koperasi Internasional, Talk Show: KOPERASI MANDIRI, RAKYAT MAKMUR yang diselenggarakan oleh Komda Surakarta, UNS Buka Pusat Studi Koperasi Pertama di Indonesia, PERHEPI Komda Bogor dilantik, pengukuhan pengurus Komda Pekanbaru, Simposium dan Seminar Nasional "Peningkatan daya saing dan keberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan di Indonesia", dan Kuliah Umum Mahasiswa S1 Universitas Islam Riau.

Pembaca dapat berpartisipasi mengirimkan berita seputar PERHEPI melalui email kami perhepi.news@gmail.com.

Partisipasi pembaca sekalian kami tunggu. Selamat membaca.

2 - 15
Artikel dan
Isi Berita



Koperasi pertanian terbukti sebagai model penting kewirausahaan petani kecil yang dapat mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan pendapatannya.
Lombok | @Yukezain Galery

2 KEWIRAUSAHAAN KOPERASI PERTANIAN

Burhanuddin

Staf Departemen Agribisnis FEM IPB dan anggota PERHEPI

Pendahuluan

Di banyak negara, koperasi pertanian terbukti sebagai model penting kewirausahaan petani kecil yang dapat mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan pendapatannya. Di Amerika Serikat, koperasi pertanian bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sekitar sepertiga dari input produksi dan kredit petani, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Koperasi bertanggung jawab untuk memasarkan lebih dari 70 persen susu dan hampir 30 persen dari semua komoditi lainnya. Kewirausahaan koperasi merupakan instrumen penting untuk membantu penduduk pedesaan menciptakan lapangan kerja dan melakukan diversifikasi sumber-sumber pendapatannya (United Nations, 2007). Pengembangan koperasi telah diadopsi sebagai strategi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di sejumlah besar negara.

Kewirausahaan didefinisikan sebagai proses inisiatif pribadi untuk mengubah sebuah konsep bisnis menjadi usaha baru atau untuk tumbuh dan mendiversifikasi usaha yang ada dengan potensi pertumbuhan tinggi (UNDP, 1999). Voslee (1994) menegaskan bahwa pemahaman konsep dan peran kewirausahaan menentukan proses pembangunan ekonomi. Wenneker dan Thurik (1999) menggambarkan model kewirausahaan yang mengidentifikasi tiga tingkat di mana kewirausahaan dapat dilihat dari sisi individu, perusahaan dan wilayah. Juga mengidentifikasi tiga dimensi kewirausahaan, yakni kondisi yang mengarah pada kewirausahaan, atribut-atributnya dan dampak kewirausahaan. Dalam kaitan dengan individu, kondisi untuk kewirausahaan adalah budaya dan insentif, sedangkan elemen-elemen atributnya adalah sikap, keterampilan dan kreativitas, serta dampaknya adalah realisasi diri dan pendapatan.

Pengembangan sistem kewirausahaan yang efektif mengintegrasikan berbagai program, produk dan jasa yang komprehensif, fleksibel, sensitif pada budaya, dan terpadu, sertamembutuhkan penyedia untuk berkolaborasi daripada beroperasi secara independen (Dabson, 2005). Koperasi kewirausahaan pertanian memiliki potensi untuk mendorong pembangunan pedesaan dalam hal pekerjaan dan menciptakan pendapatan (United Nations, 2007), memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, dan telah diakui sebagai pendekatan yang penting di negara-negara berkembang.

Faktor Kewirausahaan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kewirausahaan koperasi pertanian adalah organisasi, psikologis/kognitif, pendidikan, ekonomi, karakteristik pribadi, finansial, sosial dan peraturan yang berlaku. Hal ini karena, faktor-faktor tersebut diduga kuat mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan kesinambungan kiner koperasi pertanian. Menurut Ronning dan Ljunggren (2007), faktor psikologis/kognitif adalah yang paling penting. Selain itu, faktor pendidikan selalu berpotensi memainkan peran penting dalam kegiatan kewirausahaan koperasi pertanian. Lingkungan peraturan dan kebijakan yang kondusif merupakan prasyarat yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan koperasi pertanian. Begitu juga dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya (Dodd dan Gotsis, 2007).

Oleh karena itu, perlu membuat penduduk pedesaan lebih sadar akan manfaat dari kewirausahaan dan untuk mengatasi isu-isu kebijakan dan peraturan yang berdampak pada pengembangan kewirausahaan koperasi pertanian. Kewirausahaan diyakini memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu meningkatkan kondisi kehidupan penduduk pedesaan melalui koperasi-koperasi pertanian. Selain kewirausahaan koperasi berperan dalam menciptakan lebih banyak pekerjaan, juga memunculkan strategi inovatif khusus dalam pembangunan pedesaan.

Kunci Keberhasilan

Secara teoritis tingkat pendidikan berbanding lurus dengan penguasaan terhadap informasi, semakin tinggi pendidikan akan semakin banyak informasi yang diketahui. Jumlah informasi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, baik kecepatan maupun ketepatannya. Keputusan dalam produksi dan pemasaran merupakan tindakan krusial dalam mengelola bisnis di koperasi. Walaupun koperasi-koperasi di Iran memberikan fakta bahwa peranan tingkat pendidikan pengurus dan anggotanya merupakan faktor kunci, namun Ronning dan Ljunggren (2007) menyatakan bahwa petani di koperasi Norwegia memiliki sikap negatif tentang pendidikan. Kondisi di koperasi Norwegia ini tidak berbeda dengan koperasi di Indonesia. Hal ini dapat diduga karena kebijakan makro ekonomi pemerintah masih fokus pada pertumbuhan produksi, sehingga alokasi anggaran banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi barang-barang. Juga, dapat diduga karena kinerja sektor pendidikan itu

Artikel

Kewirausahaan
Kopesari
Pertanian

sendiri masih memiliki banyak persoalan, misalnya pemerataan pendidikan dasar, tingginya biaya pendidikan, ketimpangan kurikulum, sedikitnya agen-agen pengetahuan, dan lain sebagainya.

Kondisi koperasi-koperasi di Indonesia umumnya baik pengurus maupun anggotanya adalah rendah rata-rata tingkat pendidikannya, terutama pada koperasi-koperasi pertanian dalam arti luas. Walaupun ada juga yang berpendidikan sarjana, namun besarnya kesenjangan pendidikan antara pengurus dan anggota koperasi menyebabkan transmisi pengetahuan tidak berjalan dan cenderung menimbulkan moral hazard, sehingga koperasi di Indonesia tidak bisa berdaya saing.

Padahal jika pendidikan masyarakat koperasi semakin tinggi yang disebabkan oleh lingkungan yang kondusif untuk akses dan mendapatkan pendidikan berkualitas akan mendorong kreativitas bisnis koperasi pertanian, sehingga mampu dengan sendirinya meningkatkan pendapatan dan menciptakan produk-produk pangan baru. Sebagai ilustrasi, koperasi akan dapat menjalankan bisnisnya pada pasar dalam negeri dan luar negeri dengan memahami struktur pasar dan target pasarnya. Hal ini karena koperasi yang digerakkan oleh pendidikan yang tinggi dapat mengetahui informasi pasar dengan lebih baik, sehingga mampu memperoleh keuntungan maksimal dengan mengoptimalkan sumberdaya.

Akhirnya, koperasi memiliki posisi tawar yang kuat, namun di Indonesia justru sebaliknya. Hampir semua koperasi di Indonesia posisi tawarnya lemah, misalnya antara koperasi peternak sapi perah dengan industri pengolahan susu dengan struktur pasarnya yang cenderung oligopsoni. Koperasi peternak unggas juga tidak mampu bersaing dengan industri unggas dan koperasi-koperasi pertanian tidak mampu menjadi salah satu faktor penentu harga-harga produk pertanian dalam negeri.

Koperasi Pertanian: KUD?

Lingkungan sosial budaya pedesaan Indonesia yang religius seharusnya menstimulus kewirausahaan koperasi pertanian, seperti koperasi unit desa (KUD). Secara teoritis, KUD dibentuk untuk meningkatkan taraf hidup petani di pedesaan, tetapi faktanya justru membuat permasalahan baru bagi petani. Hal ini terjadi karena nilai-nilai kearifan pedesaan (yang religius) yang merupakan faktor kewirausahaan tersebut secara sadar dipisahkan dari nilai-nilai dalam berkoperasi.

Dengan tidak adanya kewirausahaan lokal (pedesaan), peluang di bidang pertanian akan diambil oleh orang luar desa, terutama wirausaha perkotaan dan pedagang, yang mengarah ke eksploitasi dan perampasan kerja para petani. Jika pengangguran pedesaan meningkat akan sulit mengatasi masalah produksi dan profitabilitas pertanian. Hasil penelitian Hegde (2005) menunjukkan adanya tingkat keberhasilan kewirausahaan pedesaan yang sangat rendah di India, karena alasan berikut:

1. Sebagian besar petani India masih subsisten, fungsi utama pertanian sebagai sarana bertahan hidup dan digerakkan oleh tenaga kerja tidak terampil (unskill labor), pengetahuan yang tidak memadai, tidak ada teknologi dan konektivitas dengan pasar.
2. Petani pedesaan di India terlebih dahulu disadarkan akan peran kewirausahaan. Lembaga penyuluhan pemerintah yang gratis membuat petani demotivasi dan kinerja penyuluh tidak maksimal.
3. Kegiatan off farm yang berkembang cenderung mengabaikan aturan dan mengganggu lingkungan.

Kondisi di India ini tidak berbeda dengan kondisi petani di Indonesia. Namun penelitian Singhet al. (2007) yang juga India menyimpulkan bahwa Agro Processing Center (APC) tidak hanya membantu mencegah kerugian pasca panen hasil pertanian, tetapi juga membantu dalam memberikan lapangan kerja dan pendapatan kepada pemuda pedesaan. Dengan demikian, akan memicu proses pembangunan pertanian di pedesaan yang akhirnya memacu surplus pangan. Ini berarti APC memberikan iklim yang kondusif bagi kewirausahaan pedesaan melalui investasi dan pembangunan infrastruktur pertanian, sehingga sebagai solusi potensial untuk pengangguran pedesaan.

Di Indonesia, dengan hanya bergantung pada peran pertanian modern, ketahanan pangan tidak akan tercapai, walaupun pertanian modern dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensinya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian perlu menemukan model bisnis baru yang memungkinkan untuk penciptaan nilai yang lebih besar dan yang paling penting menangkap nilai yang lebih besar. Disinilah peran kewirausahaan koperasi pertanian pedesaan menjadi kuncinya.

Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang posisi penyuluh pertanian lapang (PPL) yang diserahkan ke daerah akibat desentralisasi. Hal ini membuat pemerintah tidak lagi memiliki agen pengetahuan pada level pedesaan, sehingga akan sulit menerapkan kebijakan pembangunan pertanian pedesaan. Dana hibah yang diberikan pemerintah ke petani melalui KUD misalnya ternyata tidak mampu memperbaiki perekonomian pedesaan, karena tidak ada lagi yang memberitahu petani bagaimana

Artikel

Kewirausahaan
Kopesar
Pertanian

caranya menggunakannya. Di satu sisi, perangkat KUD tidak memiliki kapasitas untuk membuat perencanaan produksi dan target pendanaan yang lebih berorientasi pasar. Di sisi lain, pemerintah tidak dapat mengontrol proyek-proyek peningkatan produksi pertanian.

Pada kondisi demikian, pemerintah kemudian memperkuat KUD dengan membuat kemitraan dengan swasta di perkotaan. Secara teoritis ini dapat dipahami bahwa ada transfer pengetahuan dari swasta ke KUD, sehingga KUD terutama petani di pedesaan berkembang. Tetapi yang terjadi justru bukan KUD semakin terpuruk, karena ada capital drain dari desa ke kota dan meningkatnya urbanisasi.

Oleh karena itu, meskipun relatif mudah untuk menciptakan dukungan bagi koperasi pertanian di pedesaan melalui kemitraan dengan swasta atau asosiasi di perkotaan, namun sangat sulit untuk menyajikan informasi, terutama informasi pasar, yang dipahami wirausaha pedesaan. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi dengan instansi pemerintah untuk mendorong inovasi di daerah pedesaan. Padahal, menurut Cannarella dan Piccioni (2003) untuk memenuhi kebutuhan inovasi pedesaan adalah dengan peningkatan kerjasama (kemitraan) petani untuk mendapatkan dukungan dana, pembuatan perencanaan dan target yang lebih baik, dan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar.

Penutup

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang membuat koperasi pertanian di pedesaan dapat akses ke pendidikan dan keterampilan kewirausahaan secara simultan sangat penting. Bentuk-bentuk pengajaran yang efektif yang menjangkau pedesaan atau yang sudah melembaga di pedesaan, umumnya non formal, diberi muatan kewirausahaan lebih intensif. Misalnya, belajar mandiri, ceramah, demonstrasi, audio video, kunjungan lapangan, pelatihan, dan lainnya. Hal yang penting adalah membuat petani dapat berinteraksi secara aktif dengan petani lain, dengan kelompok, dengan konsumen, dan dengan stakeholder pertanian lainnya.

Kedepan, strategi bersaing baru harus dikembangkan dengan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui pengembangan pola pikir kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan koperasi pertanian di pedesaan bukan lagi hanya didorong oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga ditopang kuat oleh penelitian ilmiah lembaga penelitian pertanian.

Daftar Pustaka

- Cannarella, C. and Piccioni V. 2003. Innovation transfer and rural SMEs. *Journal of Central European Agriculture* (online) 4 (4), 371-388.
- Dabson, B., 2005. *Fostering Entrepreneurship Development Systems in Rural America*. Kellogg Foundation.
- Dodd, S.D. and G. Gotsis, 2007. The interrelationships between entrepreneurship and religion. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovations*, 8(2): 93-104.
- Hegde, N.G. 2005. *Entrepreneurs Experiences in Agriculture*. Presented at the VII Agricultural Science Congress at the College of Agriculture, Pune, February 2005. 16-18.
- Ronning, L. and E. Ljunggren, 2007. *Community Entrepreneurship: Building Entrepreneurship-facilitating social capital*, Nordland Research Institute, Norway.
- Richards, S.T. and S.L. Bulkley. 2007. *Agricultural Entrepreneurs: The First and the Forgotten?* Entrepreneur Series 4/26/2007. The Hudson Institute, Center for Employment Policy. New York.
- Singh, K.P., A.K. Srivastva, K. Srinivas, S.R.K.Singh, and H.S.Gupta. 2007. *Entrepreneurship Development in Agriculture through Agro Processing Centre: a Case Study of Almora District in NW Himalaya*. Invited Overview No. 2. Vol. IX. February, 2007. Vivekananda Institute of Hill Agriculture, (Indian Council of Agricultural Research) Almora, Uttaranchal – 263 601, India.
- United Nations, 2007. *Developing women's entrepreneurship and e-business in green cooperatives in the Asian and Pacific Region*. New York.
- UNDP, 1999. *Entrepreneurship development. Essential No.2*. Evaluation Office, New York.
- Voslee, W.B., 1994. (ed.). *Entrepreneurship and Economic Growth*. Pretoria: HSRC Publisher.
- Wennekers, A.R.M. and A.R. Thurik, 1999. Linking entrepreneurship and economic growth. *Small Business Economics*, 9(3): 27-55.

3

MEMBANGKITKAN PERAN KOPERASI (KEMBALI)

A Faroby Falatehan

Dosen Bagian Ekonomi Pertanian, Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Email: affalatehan@gmail.com

Peran koperasi saat ini nyarus tak terdengar, walaupun masih terdapat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sementara itu di daerah pun terdapat Dinas Koperasi. Itulah anehnya, walaupun dari atas sampai ke bawah kelembagaan yang menaungi koperasi ada, tetapi kiprahnya nyaris tak terdengar. Padahal koperasi mengalami masa kejayaan pada era Orde Baru, pada masa itu banyak sekali koperasi, dari tingkat desa hingga tingkat nasional, dari kantor pemerintahan sampai ke perusahaan swasta.

Sebetulnya miris juga melihat kendala koperasi seperti ini, padahal para ahli koperasi di Indonesia sangatlah banyak, baik para akademisi maupun profesional. Dari masyarakat biasa hingga ke menteri. Tetapi tetap saja koperasi tidak merangkak maju, bahkan seperti terjun bebas di era reformasi sekarang ini. Dulu banyak koperasi memiliki banyak fungsi, dari penyalur pupuk, simpan pinjam dan lainnya, sekarang banyak koperasi hanya menjadi penerima pembayaran listrik. Hidup segan, mati tak mau.

Keadaan Koperasi Masa Lalu

Apakah masyarakat tidak memerlukan koperasi? Apakah konsep koperasi sudah kuno? Apakah saat ini masyarakat sudah hidup individual? Banyak sekali pertanyaan yang menyangkut mengapa koperasi di Indonesia kondisinya begitu bertolak belakang dengan keadaan koperasi pada era orde baru.

Jika dilihat ke belakang, pada era orde baru, jika dilihat secara detil lagi, sebetulnya siapa sih orang-orang yang mendirikan koperasi? Apakah koperasi memang betul didirikan oleh para anggotanya? Apakah koperasi memang didirikan berdasarkan keinginan dari para anggotanya? Apakah para anggota koperasi mengerti arti dari koperasi? Sepertinya dari beberapa pertanyaan ini kita dapat menjawabnya, terutama ketika kita ingat kata-kata petunjuk di era orde baru: asal bapak senang.

Asal Bapak Senang, itulah yang membuat perekonomian dan pembangunan Indonesia di akhir era orde baru mengalami kemunduran. Pada saat itu, jika presiden mengatakan sesuatu hal, seakan-akan itu adalah wajib dilakukan, sehingga semua lini di pemerintahan harus melakukannya. Apalagi yang berbau perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, semua hasilnya bagus, asal bapak senang.

Ini terjadi juga di beberapa koperasi, jika kita melihat suatu koperasi, maka dengan mudah kita melihat dari data-data siapa saja anggotanya, bagaimana aturannya, semuanya lengkap. Tetapi sebenarnya siapa yang bekerja dan mengambil keuntungan? Sebagian besar yang aktif di koperasi adalah ketua dan beberapa jajaran di tingkat atas koperasi tersebut, sedangkan para anggotanya hanya manut-manut saj, bahkan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh koperasi tersebut.

Misalnya saja ada waktu dulu beberapa koperasi mendapatkan kemudahan dari pemerintah untuk mendapatkan terigu, yang pada waktu dulu hanya lembaga-lembaga tertentu saja yang boleh mengakses, ternyata sebagian besar surat penebusan terigu dijual ke beberapa agen bahan pokok, sehingga koperasi hanya memiliki nama sebagai penerima terigu, tetapi yang menebus terigu adalah agen sembako, selanjutnya sudah pasti terigu yang diberikan kepada koperasi, akhirnya pendistribusiannya tidak sampai ke anggotanya. Akhirnya koperasi hanya mendapatkan fee saja, dan itu pun tidak sampai dibagikan kepada para anggotanya.

Begitu juga dengan KUD, orang memplesetkannya Ketua Untung Duluan, yang menjadi masalah adalah ketika pemerintah membebaskan penyaluran pupuk dilakukan baik oleh swasta maupun koperasi/KUD, ternyata KUD tidak dapat bertahan, karena keterbatasan modal, sehingga kalah bersaing dengan pihak swasta. Hal ini dikarenakan koperasi diberi peran yang melebihi kapasitasnya, terutama kapasitas keuangannya, sebagaimana prinsip dari koperasi, modal koperasi didapat dari sharing para anggotanya melalui simpanan wajib dan simpanan pokok. Selain itu terdapat cara paling konvensional yang dianut koperasi dalam berusaha adalah pooling, yaitu pembelian atau penjualan bersama. Pembelian bersama dilakukan oleh koperasi konsumen yang anggotanya memerlukan barang konsumsi. Sedang penjualan bersama diperlukan oleh koperasi produsen yang anggotanya memerlukan penjualan barang yang diproduksi dan atau pembelian bersama sarana produksi. Meskipun modal tetap diperlukan, tetapi dengan pooling kebutuhan modal dapat ditekan serendah mungkin, karena tidak ada transaksi jual-beli antara koperasi dengan anggotanya (Sularso dalam Smeccda).

Artikel

Membangkitkan
Peran Koperasi
(Kembali)

Penutup

Dari gambaran di atas, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya dari konsep koperasi tidak ada masalah, karena sejak dahulu kala nenek moyang kita banyak melakukan kegiatan dengan cara gotong royong. Yang bermasalah adalah ketika gotong royong itu kemudian masuk unsur keuangan, dimana sebagian besar masyarakat kita memiliki keterbatasan modal, hanya beberapa saja yang memiliki modal, sehingga konsep koperasi tidak berjalan, konsep gotong royong tidak bisa berjalan, yang berjalan tinggal masalah uang, ketika uang berjalan, maka yang terjadi keiklisan akan berkurang. Oleh karena itu sebaiknya peranan koperasi sebaiknya disesuaikan dengan fungsinya, jangan dipaksakan.

Hal lainnya adalah pendirian koperasi, tidak sedikit koperasi yang didirikan karena top down, asal bapak senang, sehingga para anggota belum sehati dengan koperasinya, hanya nama saja, mereka tidak ikut dalam kegiatan koperasi, sekadar formalitas saja.

Sebetulnya masyarakat masih memerlukan koperasi, hanya sebaiknya dari merekalah keinginan untuk membuat dan menghidupkan koperasi. Jangan dipaksa koperasi melakukan sesuatu hal yang susah dilaksanakan oleh koperasi tersebut, misalnya seperti memerlukan modal yang besar untuk dapat menyalurkan sesuatu. Baiknya peranan koperasi disesuaikan dengan keadaan dari koperasi tersebut, tidak boleh dikarbit. Pemerintah sebagai perangsang saja. Mudah-mudahan dengan menggunakan model bottom up, maka koperasi dapat berjaya kembali.

Artikel

4

“REVITALISASI BULOG”

Oleh : Entang Sastraatmadja

Kalau usulan dari DPR dan Pemerintah (RUU Pangan) tentang peningkatan peran dan keberadaan Perum Bulog dalam pola pengadaan pangan strategis di dalam negeri ditetapkan dalam Undang Undang Pangan yang baru, boleh jadi hal ini bakal membawa aura baru dalam sistem perpanganan di negeri ini. Sekalipun RUU Pangan belum ditetapkan menjadi Undang Undang Pangan, namun sinyal untuk merevitalisasi Bulog, kini sudah mulai digaungkan oleh Presiden Sby, terutama setelah kita dihebohkan dengan tingginya harga kedelai di dalam negeri, yang melahirkan aksi mogok kerjanya para perajin tahu dan tempe. Isyarat penting yang dapat kita catat atas kemauan politik Pemerintah terhadap Bulog adalah menjadikan Bulog sebagai lembaga stabilisasi pangan, memperbanyak komoditas yang ditangani Bulog dan efisiensi dalam pengelolaan kinerjanya.

Penegasan Presiden Sby diatas, tentu saja agak “bersebrangan” dengan perkembangan Bulog selama 14 tahun berjalan ini. Bulog yang sejatinya dimintakan untuk menjadi semacam “lembaga parastatal”, selama ini malah disiapkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah BUMN Pangan yang faktanya kerap kali terjebak dalam dualisme kepentingan. Di satu sisi harus mengembangkan PSOnya, namun di sisi yang lain Perum Bulog tetap dituntut untuk mampu menjalankan fungsi bisnisnya. Rupanya, harapan yang demikian belum dapat diwujudkan. Faktanya, Perum Bulog tetap lebih serius menjalankan peran PSOnya ketimbang melakukan pengembangan bisnisnya. Artinya, kalau kita sempat jalan-jalan ke Perum Bulog, maka yang menjadi “captive market”nya adalah program raskin, disamping juga tetap melakukan pengadaan dalam negeri dan pengelolaan cadangan pangan. Di luar itu, tampak teman-teman di Perum Bulog sedang mencari bentuk.

Sejak kelahirannya, Badan Urusan Logistik (BULOG) memang dirancang untuk selalu dekat dengan petani. BULOG inilah yang diberi tugas dan kewajiban untuk mengelola bahan pangan strategis bagi kebutuhan rakyat. BULOG jelas tidak disiapkan untuk menjadi Badan Usaha yang profesional. Tapi, harapan yang dibebankan kepada BULOG adalah mampu memainkan peran strategisnya selaku regulator, stabilisator dan dinamisator bahan pangan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan/cadangan mau pun yang berkaitan dengan harga pangan itu sendiri.

Oleh karena itu, tatkala kita “menyerah” dan harus tunduk pada keinginan IMF, maka BULOG pun dipaksa untuk berubah “wajah” dari sebuah kelembagaan negara yang ketika itu dikenal dengan sebutan Lembaga Pemerintah

Artikel

Revitalisasi
BULOG

Non Departemen (LPND), menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam status Perusahaan Umum (Perum). Lazim nya sebuah BUMN, keberadaan Perum Bulog sudah tidak mungkin lagi akan berperilaku sebagai “lembaga negara” yang dekat dengan petani, namun jika kita cermati aturan main sebagaimana yang terekam dari kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), disana jelas tersirat bahwa Perum Bulog tidak diperkenankan untuk membeli harga gabah atau beras di bawah angka HPP.

Untung ketika itu harga gabah di tingkat petani selalu atau bahkan jauh di atas harga HPP. Bayangkan, jika kondisi nya harga gabah di tingkat petani berada di bawah harga HPP. Nasib petani yang kini sudah terpuruk, boleh jadi bakal menjadi semakin teraniaya saja. Itu sebab nya, jika Pemerintah menyetujui usulan DPR tentang RUU Pangan sebagai upaya untuk merevitalisasi UU No 7/1996 tentang Pangan, maka suka atau tidak suka kita sudah harus siap-siap menyambut kedatangan era liberalisasi pangan.

Untung nya hal tersebut tidak bakal terjadi. Setelah melalui perdebatan panjang bahkan sempat “deadlock” segala, dalam RUU Pangan ini tersirat bahwa Perum Bulog tetap akan diberi kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengadaan beberapa komoditas pangan strategis dalam negeri, guna mengelola nya sebagai cadangan. Padahal usulan awal nya, peran itu rencana nya bakal diberikan kepada para pedagang, bahkan para pedagang ini pun diberi keleluasaan penuh untuk mengelola cadangan pangan. Info terakhir, DPR dan Pemerintah sepakat justru peran Bulog lah yang akan diperkuat. Lalu bagaimana peran dan keberadaan Perum Bulog ke depan ? Inilah sebetul nya yang penting kita cermati.

Walau fenomena ini masih sebatas prediksi, namun tidak ada salah nya bila nasib Perum Bulog paska RUU Pangan ini sudah kita perbincangkan sedini mungkin. Ini penting dipahami, karena sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, kita tetap masih membutuhkan lembaga distribusi yang handal dan berada dalam kelembagaan Pemerintahan. Perum Bulog memang memiliki pengalaman dalam soal logistik. Masalah nya adalah apakah dalam era otonomi daerah sekarang masih terbuka peluang bagi “negara” untuk menugasi Pemerintah Pusat menangani hal-hal yang strategis ? Rasa nya masih ya.... Coba kalau pengelolaan minyak dan gas bumi tidak dikelola Pertamina ; apakah akan lebih baik atau tidak ? Soal pangan, bisa jadi tidak jauh berbeda dengan minyak dan gas bumi. Yang jelas kita jangan pernah memandang sebelah mata terhadap masalah penanganan pangan di negeri tercinta ini.

Bulog Masa Depan

“Bulog harus jadi perusahaan besar”. Itulah pernyataan Dahlan Iskan yang nota bene juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, terhadap Perum Bulog yang menurut sejarah nya memiliki andil besar dalam menciptakan stabilitas harga pangan, khusus nya beras. Harapan Dahlan Iskan yang demikian, tentu perlu kita dalam lebih seksama, terutama bila hal ini kita kaitkan dengan sejarah kelahiran Bulog itu sendiri. Benarkah Bulog bakalan mampu tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan besar, padahal kalau kita amati status yang dilekatkan kepada nya, Bulog tetap harus menjalankan fungsi PSO nya. Lebih parah lagi, kondisi Bulog saat ini, hampir 90 % kegiatan nya Perum Bulog memang berkonsentrasi pada pengadaan produksi beras di dalam negeri dan pengelolaan program beras untuk masyarakat miskin atau lebih akrab dengan sebutan Program Raskin. Boleh jadi, hanya 10 % saja kiprah Perum Bulog dalam menjalankan fungsi komersial nya.

Bulog akronim dari Badan Urusan Logistik. Para perancang nya berkeinginan agar negara memiliki lembaga yang betul-betul serius menangani urusan logistik, khusus nya bahan pangan pokok masyarakat. Hasrat yang demikian, di berbagai negara tetangga seringkali disebut dengan istilah “lembaga parastatal”. Bulog mesti nya mampu memainkan peran parastatal nya dengan cara menciptakan stabilisasi harga di masyarakat. Dari sinilah kemudian lahir kebijakan harga dasar dan kebijakan harga atap, yang semangat utama nya adalah melakukan perlindungan kepada petani di waktu panen raya, sekaligus juga melindungi konsumen dari perilaku oknum tertentu, yang sering menjadikan harga beras merangkak naik.

Penetapan Harga Dasar (floor price) sendiri, pada inti nya merupakan wujud pembelaan Pemerintah terhadap para petani padi, yang dari berbagai pengalaman sering dijadikan “komoditi” para pedagang di saat masa panen raya berlangsung. Tanpa ada nya Harga Dasar, dapat dibayangkan

Artikel

Revitalisasi BULOG

bagaimana nasib para petani bila harga yang terjadi dimainkan oleh para tengkulak atau pedagang. Untuk itu, dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesejahteraan petani, maka ketika itu, setiap tahun Pemerintah selalu menaikkan Harga Dasar Gabah guna menyesuaikan dengan peningkatan inflasi. Sedangkan Harga Atas (ceiling price), memang sebuah pola yang mempertontonkan keberpihakan Pemerintah terhadap konsumen. Itulah sebabnya, tatkala harga beras di pasar sudah sulit dikendalikan, maka tidak ada langkah lain yang dapat digarap terkecuali menyelenggarakan operasi pasar beras. Walau operasi pasar beras dianggap tidak signifikan lagi dalam menurunkan harga beras yang terjadi di pasar, namun secara psikologis operasi pasar beras, dapat mengerem laju kenaikan harga beras itu sendiri.

Menampilkan Bulog menjadi perusahaan besar, rupanya bukan hal yang cukup mudah untuk diwujudkan. Yang diinginkan agar Bulog mampu tumbuh dan berkembang ibarat "konglomerat", juga telah diutarakan oleh Mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspojo. Sebagai orang yang layak dapat apresiasi, Widjanarko adalah sosok petinggi Perum Bulog yang terlihat getol merevitalisasi Bulog dari statusnya Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perum Bulog (BUMN). Di bawah kepemimpinannya, Perum Bulog berusaha untuk muncul menjadi sebuah perusahaan besar yang berkiprah dalam pembangunan pangan. Sayangnya, sebelum cita-cita tersebut dapat diwujudkan, Widjanarko dan beberapa orang petinggi Perum Bulog tersandung masalah hukum yang ujung-ujungnya menyebabkan mereka terpaksa harus mengungsi ke hotel di luar negeri.

Soal lain yang tak mudah dituntaskan, manakala ada hasrat untuk menjadikan Perum Bulog sebagai perusahaan besar adalah terkait dengan "mental" pegawai Perum Bulog yang umumnya dicetak untuk tidak tumbuh dan berkembang ke arah sosok pengusaha. Rata-rata mereka ditempa untuk menjadi birokrat yang memiliki tupoksi guna memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu, ketika ada kehendak untuk menjadikan Perum Bulog sebagai perusahaan besar, maka perubahan mental para pegawainya, sudah sepantasnya memperoleh perhatian yang lebih serius ketimbang kita menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) misalnya. Pengalaman hampir 10 tahun status Bulog dari LPND berubah menjadi Perum Bulog, menjelaskan kepada kita bahwa sangat tidak gampang mencetak pegawai berkelas pengusaha tatkala para pegawai itu dicetak untuk menjadi para birokrat.

Bulog masa depan, memang sebuah persoalan yang perlu dicari solusi terbaiknya. Perdebatan yang panjang apakah Bulog lebih pas diarahkan sebagai lembaga parastatal yang dalam kelembagaannya harus berstatus "plat merah" atau Bulog lebih tepat dijadikan sebagai badan usaha milik negara, sehingga kelembagaannya memiliki dua peran yang melekat sekaligus (fungsi PSO dan fungsi Bisnis); pada hakekatnya sudah saatnya kita simpulkan secara cerdas. Oleh karena itu, bila sekarang ini Perum Bulog hanya berkiprah dalam melakukan pengadaan gabah/beras dalam negeri dan sesekali ditugasi untuk impor beras serta diminta untuk mengelola program raskin, maka apa-apa yang diinginkan Dahlan Iskan agar Bulog dapat menjadi perusahaan besar, ada baiknya kita perdalam lebih lanjut. Apalagi kalau hal ini kita kaitkan pula dengan semangat UU Pangan yang baru, dimana ada kehendak untuk mereduksi peran kelembagaan pangan ke arah yang lebih senafas dengan tuntutan yang ada. Catatan pentingnya, keinginan Dahlan Iskan untuk menjadikan Bulog sebagai Perusahaan Besar, tentu tidak hanya berhenti dalam tataran ide, namun akan ditindak-lanjuti pula lewat langkah-langkah nyata di lapangan.

Bulog Daerah

Perbincangan soal Bulog Daerah atau "Bulogda", rupanya menjadi semakin mengedepan setelah dalam RUU Pangan muncul semangat untuk meningkatkan peran Bulog yang selama ini memiliki peran guna menciptakan "stabilisasi pangan", khususnya beras. Sejak Bulog didirikan, baik ketika statusnya Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti saat ini, keberadaan Bulog, tentu saja harus mampu tampil sebagai lembaga parastatal, yang dapat memelihara ketersediaan dan mengamankan cadangan, sekaligus juga mampu memelihara stabilitas harga.

Dalam RUU Pangan, telah dirancang adanya peluang bagi daerah dan para pengusaha/penggilingan padi dalam menjalankan fungsi pengadaan dan penyaluran berbagai kebutuhan bahan pangan. Dengan semangat otonomi daerah, gaya-gaya yang sifatnya sentralistik, harus dirubah menjadi

Artikel

Revitalisasi
BULOG

desentralistik. Itulah sebabnya, daerah dituntut untuk mampu melakukan pengelolaan pangan secara lebih dinamis, mandiri dan profesional. Termasuk di dalamnya kesiapan dan keseriusan daerah dalam merancang tampilnya "Bulogda", yang dalam operasionalnya mampu menjadi "prime mover" pembangunan pangan di daerah, baik dalam memenuhi ketersediaan/cadangan, atau pun dalam menjaga stabilitas harga dan distribusinya yang merata.

Secara kelembagaan "Bulogda", lebih pas jika dikemas dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus bergerak di bidang pangan. Lebih spesifiknya lagi di beras. Sebagai BUMD, "Bulogda" tentu tidak terlepas dari peran sosial (Public Service Obligation = PSO) dan peran bisnis (komersil). Ke dua peran ini mestinya mampu melekat secara harmonis dalam sebuah BUMD. Ke dua peran ini perlu dipersepsikan secara proporsional dengan mempertimbangkan beragam faktor. Yang keliru selama ini adalah terdapat kesan bahwa BUMD itu wajar kalau rugi. Padahal dalam konteks kekinian, paradigma BUMD sudah harus segera berubah.

Pendirian setiap BUMD sudah harus dihitung secara cermat untung dan ruginya. Hanya bidang usaha yang menguntungkan saja yang dapat di garap oleh sebuah BUMD. Setelah memperoleh keuntungan baru berkiprah tentang fungsi sosialnya. Kesalahan kita selama ini, BUMD lebih banyak yang terjebak dalam urusan-urusan sosial. BUMD relatif lemah dalam melakukan pengelolaan usaha secara profesional. Bukan saja belum adanya "grand desain" yang jelas dan tegas tentang kiprahnya dalam pembangunan ekonomi daerah, ternyata para pengelola BUMDnya sendiri, relatif masih mengikuti pola-pola lama.

Ada pengelola yang latar belakangnya mantan-mantan pejabat, atau malah ada yang masih menjabat namun menjelang pensiun. Ada pengelolanya yang merupakan titipan partai politik. Dan jarang sekali kita temukan para pengelola BUMD yang betul-betul profesional. Lebih sedih lagi adalah adanya anggapan dari pengelola bahwa kisah sukses sebuah BUMD lebih diukur dari berapa besar penyertaan modal yang diberikan Pemerintahan, ketimbang kemampuan manajemen dalam mengembalikan aset atau penyertaan modal yang telah diberikannya itu. Akibatnya wajar, jika yang terjadi kemudian adalah lebih banyak BUMD yang gulung tikar, dari pada yang mampu tumbuh secara sehat, mandiri dan profesional.

"Bulogda" memang harus memiliki kekhasan. Kehadirannya dalam menopang perekonomian daerah, selayaknya dikaitkan dengan arah kebijakan daerah yang berbasis pada kearifan lokal daerah masing-masing. Berkaitan dengan RUU Pangan yang kini masih digodok oleh DPR dan Pemerintah, keberadaan "Bulogda" diharapkan mampu "mendampingi" kiprah Perum Bulog di daerah, yang karena pertimbangan tertentu, peran Perum Bulog itu perlu ditingkatkan. Dalam rangka memantapkan peran inilah, "Bulogda" mestinya berani tampil dengan terobosan-terobosan cerdasnya.

Peran strategis "Bulogda" antara lain harus mampu menciptakan pengadaan beras sesuai dengan prognosa yang direncanakan. Langkah ini penting dijadikan prioritas, karena bila pengadaannya sesuai dengan yang dirancang, tentu cadangan pun akan terpenuhi dengan baik, sehingga tidak perlu tergopoh-gopoh melakukan impor beras. Terjadinya impor beras diatas 2 juta ton yang menelan biaya sekitar 10 Trilyun rupiah, pada dasarnya dikarenakan ketidak-akuratan kita dalam merencanakan produksi yang dihasilkan, juga disebabkan oleh ketidak-seriusan dalam melahirkan "data base" perberasan yang lebih berkualitas lagi. Gagasan untuk sesegera mungkin merevisi data produksi beras adalah hal yang sangat mendesak untuk ditempuh. Termasuk betapa urgentnya kita memiliki "satu data" perberasan.

Kita percaya, jika "Bulogda" mampu dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi "will" dan "need" semua pihak, maka kehadirannya tentu bakal memberi dampak yang diinginkan. Hanya kalau saja kita masih terjerat dalam pola lama, maka "Bulogda" pun tentu tidak akan dapat memberi manfaat yang ideal. Malah bisa saja pendirian "Bulogda" menjadi sebuah kemubaziran.

Semoga dalam perkembangannya, Bulog akan semakin ajeg dan benar-benar kehadirannya dapat memberi berkah bagi kehidupan bersama.

(Penulis adalah Pengurus Perhepi Komda Bandung)



5 Koperasi punya lambang baru

Mataram (ANTARA News) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meluncurkan lambang baru Koperasi Indonesia dalam "International Year of Cooperatives" Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 23-25 Mei 2012. "Ini lambang baru Koperasi Indonesia," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarif Hasan.

Dia menunjuk lambang baru Koperasi Indonesia yang terpampang di dinding podium utama pelaksanaan IYC Indonesia 2012 ketika membuka Festival Koperasi Internasional pertama di Indonesia itu, Rabu. Perubahan lambang/logo Koperasi Indonesia itu didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nomor SKEP/14/Dekopin-A/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perubahan Lambang/logo Koperasi Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia.

Syarief mengatakan, lambang Koperasi Indonesia yang baru itu berbentuk gambar bunga yang memberi kesan perkembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia. Gambar bunga itu mengandung makna Koperasi Indonesia selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi.

Lambang Koperasi Indonesia yang baru itu didominasi oleh warna hijau pastel yang berwibawa dan menimbulkan kesan kalem. Bentuknya juga lain sama sekali dari yang sebelumnya yang berbentuk pohon beringin yang dikelilingi kapas dan padi, timbangan, bintang dalam perisai, gerigi roda, dan berwarna merah dan putih. Pada lambang baru, gambar bunga dengan empat kelopak ingin menyampaikan impresi bahwa perkembangan dan kemajuan perkoperasian Indonesia harus dicapai dengan cara yang berwawasan, variatif, inovatif, dan produktif. Keempat kelopak yang terkembang dalam 4 penjuru mata angin mencerminkan maksud Koperasi Indonesia sebagai penyalur aspirasi, dasar perekonomian nasional kerakyatan, penjunjung tinggi prinsip kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi serta menuju pada keunggulan dalam persaingan global.

Sumber: <http://www.antarane.ws.com/berita/312006/koperasi-punya-lambang-baru>



6 PERHEPI dan BPS Tandatangani MoU : Kegiatan Sensus Pertanian 2013

PERHEPI, Bogor, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat melakukan kerjasama dalam hal penyesuaian pelaksanaan Sensus Pertanian 2013. Ketua Umum PERHEPI Dr. Bayu Krisnamurthi menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BPS, Dr. Suryamin, kerjasama ini dalam bentuk keterlibatan himpunan profesi untuk memberikan sumbangan pemikiran pada masa persiapan, pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil sensus. Ketua Umum PERHEPI berharap data-data yang berasal dari hasil sensus pertanian dapat dimanfaatkan oleh ahli-ahli ekonomi pertanian, bahkan lebih spesifik mengharapkan keterlibatan mahasiswa secara langsung dalam penyusunan Tesis ataupun Disertasi pada kasus dan wilayah tertentu, sehingga dengan demikian nantinya bisa memberikan masukan apakah dalam bentuk kebijakan atau implikasi lainnya.

Kepala BPS menyambut positif kerjasama ini, beliau mengharapkan dengan adanya kerjasama dengan himpunan profesi maka diharapkan hasil sensus pertanian dapat lebih bermanfaat dalam upaya memberikan kontribusi dalam kebijakan atau lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium I Badan Litbang Pertanian, Jl. Tentara Pelajar, Cimanggu Bogor pada tanggal 24 Juli 2012. Peserta yang hadir berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi/dosen, peneliti di lingkungan perguruan tinggi dan Badan Litbang Kementerian Pertanian RI. Serta dihadiri tokoh-tokoh senior PERHEPI diantaranya adalah Dr. Agus Pakpahan, dan Dr. Delima A. Azhari.

Diskusi yang dipimpin oleh Dr. Handewi P. Saliem (Ketua PERHEPI Komda Bogor), dengan Pembicara Dr. Sihar Lumbantobing (Deputi Statistik Produksi BPS) berjalan sangat interaktif, hal ini terlihat dari sesi diskusi yang berjalan baik dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang kritis dan membangun mewarnai diskusi umum tersebut. Kegiatan ini diakhiri dengan doa yang dibawakan oleh Dr. Idqon Fahmi (Wakil Ketua PERHEPI Komda Bogor) dan dilanjutkan Buka Puasa Bersama.

Ketua Panitia, Prof. Erizal Jamal dan Kabiro Humas dan Hukum BPS diakhir acara mengatakan akan melakukan komunikasi lebih lanjut guna mengimplementasikan MoU antara PERHEPI dan BPS dalam bentuk rencana tindak nyata dari kesepakatan yang ada. Semoga kegiatan ini bermanfaat dalam upaya membangun pertanian yang lebih sejahtera. (FWK)



7 PERHEPI KOMDA SURAKARTA MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI

Surakarta, PERHEPI, Jum'at, 6 Juli 2012
Pengurus PERHEPI Komda Surakarta dalam rangka merealisasikan program-program jangka pendek mengadakan rapat koordinasi dengan pembahasan peningkatan peran serta anggota, serta persiapan pelaksanaan Seminar Nasional Ekonomi Kreatif 2013. Beberapa point yang dihasilkan pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran anggota

Dengan padatnya agenda kegiatan PERHEPI di Pusat dan di berbagai daerah, Komda PERHEPI Surakarta menghimbau kepada anggota untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan. Dipicu keterbatasan finansial karena "tidak ada SPPD" dari lembaga formal untuk melakukan kegiatan masing-masing anggota diharapkan dapat menyediakan sendiri "pendanaan" tersebut atau dilakukan "kecerdasan financial" dengan mencantumkan sebagai dana seminar tersebut pada setiap ajuan proposal di berbagai hibah penelitian masing-masing. Pengurus menekankan bahwa manfaat yang diperoleh dalam kegiatan PERHEPI luar biasa, disamping mengasah dan meningkatkan kadar ilmiah sebagai akademisi, jejaring kerja juga dapat memberikan manfaat dikemudian hari.

2. Persiapan Pelaksanaan Seminar Nasional Ekonomi Kreatif dan Pelaksanaan Rapat Akhir Tahun PERHEPI 2013.

Pada rencana kegiatan ini sudah berbentuk proposal dan penyempurnaan segera dikirimkan ke PERHEPI Pusat untuk mendapatkan masukan. Ditunjuk berdasarkan musyawarah mufakat sebagai Ketua adalah Prof. Dr. Ir. Darsono, MSi.

3. Realisasi program jangka pendek

Untuk menggalakkan kegiatan PERHEPI berkaitan dengan "academic atmospher" di kampus diupayakan untuk memberikan pelatihan Aplikasi software untuk analisis data yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa dan dosen. Kegiatan dengan berbagai instansi dilakukan dalam bentuk forum diskusi dengan mengambil tema yang baru "in" di masing-masing daerah sekitar Surakarta. (fwk)



8 Indonesia tuan rumah Hari Koperasi Internasional

Indonesia menjadi tuan rumah peringatan Hari Koperasi Internasional atau International Year of Cooperatives 2012. "Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah International Year of Cooperatives yang akan diselenggarakan pada 22--25 Mei di Mataram, Nusa Tenggara Barat," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan di Jakarta, Rabu.

Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, menurut Sjarif, salah satunya disebabkan besarnya jumlah koperasi di Indonesia yaitu 188.181 unit dengan anggota sebanyak 30.849.913 orang. "Apalagi tema besar dalam peringatan IYC 2012 ini sejalan dengan keinginan kami melakukan gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop)," jelas Sjarif. Tema besar dalam peringatan IYC 2012 adalah Cooperatives Enterprises build a Better World dengan tiga tujuan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang koperasi dan kontribusi untuk pembangunan sosial ekonomi dan pencapaian tujuan utama milenium (MDGs).

Kedua, untuk mempromosikan dan menumbuhkan koperasi; serta mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan, hukum dan peraturan untuk pembentukan dan pertumbuhan koperasi. "Pemerintah ingin agar pembentukan koperasi dipermudah, bagaimana caranya agar tidak perlu terlalu banyak birokrasi yang harus dilalui saat mendirikan koperasi," ungkap Sjarif.

Namun ia mengaku bahwa pemerintah juga mengantisipasi pendirian koperasi simpan pinjam karena terkait dengan dana masyarakat yang masuk ke dalam koperasi. "Hal tersebut seiring dengan rancangan UU Koperasi yang saat ini sedang digodok yaitu bagaimana mendorong koperasi semakin eksis dan bagaimana koperasi dapat memberikan kontribusi yang semakin besar untuk ekonomi Indonesia," tambah Sjarif.

Saat ini menurut Syarif aset koperasi di Indonesia adalah Rp64 triliun dan kontribusi koperasi serta UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah 57,2 persen. Menegkop juga berharap pada 2012, salah satu koperasi Indonesia dapat masuk ke dalam 300 koperasi dunia. "Tahun ini harapan kami adalah ada setidaknya satu koperasi Indonesia yang masuk ke dalam 300 koperasi dunia," kata Sjarif tanpa merinci nominasi koperasi Indonesia yang mungkin masuk ke dalam daftar 300 koperasi dengan aset terbesar tersebut.

Sjarif menargetkan ada sekitar 20 negara dengan 500 peserta dari luar negeri yang akan hadir dalam IYC 2012 di Mataram tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan di sana adalah seminar internasional perkoperasian, gelar budaya daerah NTB sekaligus promosi Visit Lombok-Sumbawa 2012, field trip ke koperasi dan sentra UKM di NTB dan pameran produk koperasi dan UKM. Hasil dari acara itu diharapkan mendukung program revitalisasi Koperasi yang dicanangkan Presiden Yudhoyono pada puncak peringatan Hari Koperasi Ke-64 12 Juli 2012.

Sumber: <http://www.antaraneews.com/berita/311008/indonesia-tuan-rumah-hari-koperasi-internasional>



PERHEPI SURAKARTA

9 Talk Show: KOPERASI MANDIRI, RAKYAT MAKMUR

PERHEPI, Surakarta, Panitia Hari Koperasi Kota Surakarta yang dimotori oleh DEKOPINDA Surakarta, salah satunya mengadakan acara Talk Show “KOPERASI MANDIRI RAKYAT MAKMUR” yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Juli 2012 dalam rangka memperingati hari Koperasi ke 65 tahun 2012. Pada acara tersebut Ketua PERHEPI Komda Surakarta, Prof Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS diminta Panitia sebagai salah satu nara sumber bersama dengan Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (Suroto, SE, MM). Pada kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 150 orang peserta dari unsur-unsur anggota Koperasi Dekopinda Kota Surakarta, Segenap pengurus Koperasi Primer dan Sekunder Kota Surakarta, Mahasiswa dan Pelajar, Anggota KNPI Surakarta, Anggota HIPMI Surakarta, Masyarakat Kota Surakarta/UMUM yang berminat dan pemerhati koperasi. Acara dipandu oleh moderator tokoh muda Kota Surakarta Ketua KNPI Ir. Her Suprabu, MM

Berdasarkan UUD’45 secara justifikasi dan normatif, koperasi memiliki peran sebagai “sokoguru” dalam perekonomian nasional dalam bentuk demokrasi ekonomi. Bentuk ke“sokoguru”an koperasi diimplementasikan bahwa koperasi sebagai penampung pesan politik bangsa untuk melawan penindasan modal asing dan pemerintah kolonial, koperasi memperkuat identitas dan budaya bangsa dengan kepribadian: gotong royong” dan “kolektivitas”, koperasi sebagai wahana sosial ekonomi yang bersifat komprehensif dan sebagai wahana yang tepat sesuai dengan tuntutan kebersamaan dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan “Koperasi Mandirian Rakyat Makmur” sumber utama adalah menggarap anggota koperasi sebagai sumber utama dari eksistensi dan perkembangan koperasi melalui pemberdayaan serta mengajak peran serta anggota untuk dapat memahami “jati diri” koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi maraknya praktek koperasi yang beroperasi seperti “bank plecit” yang dibungkus dengan koperasi yang jumlahnya semakin banyak. Fenomena ini menjadi tantangan akademisi, penggiat dan pemerhati koperasi untuk membuktikan apakah lembaga itu benar-benar koperasi atau sekedar lembaga keuangan yang hanya menghindari pengawasan BI atau lembaga yang menyalahgunakan legalitas koperasi.

Satu hal yang menonjol dipertanyakan dalam forum adalah bagaimana hubungan antara identitas bangsa tentang “gotong royong” sebagai modal dasar pembangunan koperasi dihadapkan pada UU Perkoperasian No 25/ 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha, sedangkan “roh” ini tercantum dalam UU Perkoperasian No 12/ 1967. Dalam prakteknya sebagian besar pengurus merasa sulit dalam implementasi di lapangan, oleh karena itu dalam rancangan undang-undang perkoperasian yang baru, mereka berharap ada perkawinan antara keduanya secara jelas dan dapat diimplementasikan, karena sejujurnya tanpa ada keduanya sulit bagi koperasi untuk merealisasikan program-programnya. (fwk)



Pengurus Pusat PERHEPI

Mengucapkan

*Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1433 H
"Semoga Allah menjadikan kita Sebagai Manusia yang
Bertaqwa"*

**Ketua Umum,
Dr. Bayu Krisnamurthi**



10 UNS Buka Pusat Studi Koperasi Pertama di Indonesia

Selasa, 28 Juni 2011, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta meluncurkan Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rektor UNS Surakarta Ravik Karsidi mengatakan 80 persen perekonomian nasional digerakkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. "Saya setuju dengan kehadiran Pusat Studi ini," kata Ravik usai acara peluncuran di kampus setempat.

Pusat Studi memiliki tiga divisi, yaitu penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pendampingan koperasi dan UMKM. Kepala Pusat Studi Totok Mardikanto mengatakan seluruh fakultas akan terlibat dalam pendampingan. Teknisnya, semua fakultas membentuk mitra binaan yang disesuaikan dengan fakultas bersangkutan. "Misalnya untuk fakultas pertanian ada mitra tani, fakultas sastra membuat mitra budaya, fakultas kedokteran dengan mitra sehat, dan fakultas hukum membentuk mitra hukum," kata Ravik.

Sasaran pendampingan adalah pelaku usaha mikro di sektor informal. Dia mencontohkan seperti pedagang angkringan yang ada di Surakarta diprediksi ada 2 ribu pelaku usaha, usaha pertukangan, bengkel, dan industri pariwisata. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan yang hadir saat peluncuran mengatakan selama hampir dua tahun menjabat, baru kali ini meresmikan Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi dan UMKM. "Di universitas lainnya belum ada," kata Syarifuddin. Dia menilai UNS Surakarta termasuk universitas yang berpihak pada pelaku usaha mikro dan koperasi. "Nantinya kalau ada yang ingin belajar berwirausaha, belajar mendampingi pelaku usaha mikro, datanglah ke UNS," kata dia. "Semoga Pusat Studi ini bisa mengubah citra UKM dari kelas teri menjadi kakap miliaran."

Sumber: <http://ip52-213.cbn.net.id/read/news/2011/06/28/079343787/UNS-Buka-Pusat-Studi-Koperasi-Pertama-di-Indonesia>



11 PERHEPI KOMDA BOGOR DILANTIK

PERHEPI, Bogor, Bersamaan dengan kegiatan acara Diskusi Umum Persiapan Sensus Pertanian 2013 yang dilaksanakan oleh PERHEPI PUSAT, PERHEPI Komda Bogor, dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) Kementerian Pertanian, Ketua Umum melantik kepengurusan PERHEPI Komda Bogor pada tanggal 24 Juli 2014. PERHEPI Komda Bogor diketuai oleh dr. Handewi P. Saliem yang juga merupakan Kepala PSE-KP Kementerian Pertanian.

Pelantikan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Ketua Umum PP. PERHEPI mengenai susunan kepengurusan PERHEPI KOMDA Bogor dan Penyerahan Pataka Bendera kepada Ketua Komda Bogor. Ketua Umum PERHEPI berharap dengan dilantiknya kepengurusan ini, Komda Bogor dapat “menggerakkan” ekonomi pertanian di Bogor, Komda Bogor sangat strategis untuk dapat berperan lebih besar, karena jumlah anggota, insitusi yang terkait dan aktivitasnya lebih besar, sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketua PERHEPI Komda Bogor, mengharapkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak untuk mensukseskan program kerja yang akan dijalankan.

Adapun Susunan Kepengurusan PERHEPI Komda Bogor adalah sebagai Berikut:

Penasehat

Dr. Ir. Agus Pakpahan, M.Sc,

Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec

Ketua

Dr. Ir. Handewi P. Saliem, M.S

Wakil Ketua

Dr. Ir. Idqon Fahmi, M.Ec

Sekretaris I

Dr. Ir. Anna Fariyanti, M.Si

Sekretaris II

Prof. Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si

Bendahara

Nur Khoiriyah Agustin, STP., MP

Sekretaris Eksekutif

Rangga Aditya, SP

Bidang-Bidang:

Pengembangan Profesi, Keanggotaan dan Kaderisasi

1. Dr. Ir. Ratna Winandi, MS

2. Dr. Ir. Saptana, MS

3. Dr. Ir. Yetti Lies Purnamadewi, M.Sc

4. Dr. Ir. Irawan

5. Ir. Netti Tinaprilla, MM

6. Sudi Mardianto, SP. M.Si

7. Sari Anggarwati

Pengabdian Masyarakat, dan Advokasi Kebijakan

1. Ir. Syahyuti, M.Si

2. Dr. Eka Intan Kumala Putri, M.Sc

3. Dra. Yusalina, M.Si

4. Ir. Wini Nahraeni, M.Si

5. Ir. Burhanuddin, MM

6. Sumedi, SP, M.Si

Humas dan Publikasi

1. Dr. Ketut Kariyasa

2. Siti Jahroh, PhD

3. Dr. Atien Priyanti

4. Dr. Amzul Rifin, SP.MA

5. Ashari, SP. MP

6. Srii Nuryanti, STP., MP

7. Vita W. Hanifah, S.Pt



12 Selamat dan sukses atas pengukuhan pengurus Komda Pekanbaru

PERHEPI, Pekanbaru, mengawali bulan Juli 2012, kegiatan dimulai dengan proses pengukuhan Komda Pekanbaru, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2012. Bertempat di kediaman Wakil Gubernur Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, pengukuhan dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara PERHEPI Komda Lampung dengan GAPKI Cabang Riau tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi serta diskusi umum yang membahas tema "Arah Pembangunan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

Mewakili Ketua Umum PP PERHEPI, Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec yang juga merupakan salah satu ketua PP PERHEPI sekaligus sebagai anggota Komite Ekonomi Nasional, mengukuhkan pembentukan Komda PERHEPI Pekanbaru. Pengukuhan dihadiri oleh seluruh anggota Komda Pekanbaru disaksikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Bpk. HR. Mambang Mit, Ketua GAPKI Cabang Riau, Rektor Universitas Lancang Kuning, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Rektor Universitas Nasional Jakarta, dan perwakilan dari PP Perhepi.

Hari semakin malam, pertemuan dilanjutkan dengan diskusi dan ramah tamah yang dipandu oleh Bpk. Ir. Fahri Yasin, MAgr dari Komda Pekanbaru. Bapak Wakil Gubernur diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan pemikirannya terkait kemajuan Provinsi Riau, beliau menyampaikan bahwa perlunya prioritas untuk menyelesaikan permasalahan lokal bagi petani maupun nelayan sekaligus membenahi infrastruktur desa, sehingga petani tidak perlu harus pergi ke kota untuk menjual hasil panennya.

Disampaikan oleh Ketua Komda PERHEPI Pekanbaru, bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu penghasil karet terbesar di Indonesia, bila dikembangkan akan berpotensi sebagai asset nasional. Selain karet, kelapa sawit merupakan komoditi berpotensi meningkatkan ekonomi Provinsi Riau bila dapat diolah selain menjadi produk CPO. Melengkapi diskusi tersebut, Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc, guru besar IPB menyampaikan bahwa dalam dua dekade, Indonesia telah menduduki peringkat dua terbesar di dunia sebagai penghasil CPO maupun karet.

Diskusi berlangsung cukup seru dengan hadirnya narasumber yang ahli pada bidangnya. Beberapa point yang didapat pada akhir diskusi tersebut adalah; (1) Dapat dijadikan alternatif pada lahan karet yang tidak produktif dikonversi menjadi perkebunan sawit, (2) Petani sebaiknya diberikan jalan untuk dimitrakan dengan mitra yang "kualified" agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani tersebut, (3) Pengembangan UKM dengan pengelolaan yang lebih serius dan fokus sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (4) Back to Basic: comparative advantage /kembali pada keunggulan komparatif yang dimiliki daerah lokal dengan pengembangan yang sedetil-detilnya. (ik)



13 Simposium dan Seminar Nasional “Peningkatan daya saing dan keberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan di Indonesia”

Pekanbaru, Universitas Riau, bertempat di Gedung Rektorat lantai 4, Simposium dan Seminar Nasional dibuka oleh Perek II UNRI mewakili Rektor yang saat itu berhalangan hadir. Beliau menyampaikan bahwa pada bulan Oktober yang akan datang, UNRI akan berumur 50 tahun. Saat ini, UNRI telah memiliki lahan seluas 365 Ha. Beliau menyampaikan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi dalam pertanian perkebunan yang belum secara maksimal digunakan (4/7). Universitas Riau dalam mengembangkan perkebunan, saat ini telah memiliki kebun yang diberi nama “Kebun Inkubator Agribisnis” yang terletak di belakang Fakultas Pertanian Universitas Riau. Sedang dikembangkan didalamnya bibit sawit, pepaya California dan beberapa tanaman lainnya.

Diinformasikan juga oleh Ketua Komda PERHEPI Pekanbaru, Dr. Djaimi Bakce, SP, M.Si, bahwa dalam 10 (sepuluh) bulan kedepan, Komda Pekanbaru bekerjasama dengan Universitas Riau dalam rangka meningkatkan kualitas produksi benih sawit, rencananya akan melatih penangkar benih kelapa sawit kepada seluruh petani yang ada di Provinsi Riau.

Ketua Umum PP PERHEPI menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan tingkat ekonomi adalah dengan cara meningkatkan infrastruktur. Tanaman sawit dan karet mempunyai nilai lingkungan yang tinggi. Produktifitas sawit 9 (Sembilan) kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kedelai. Dalam penentuan keberhasilan penanaman sawit, kualitas bibit yang patut untuk diperhatikan. Beliau menambahkan bahwa terdapat 3 (tiga) jalur pemanfaatan produk sawit; (1) Food Grade untuk minyak sayur, (standar nasional, minyak goreng harus mengandung vitamin A), yang menjadi tantangan saat ini adalah mempertahankan beta karoten yang terdapat dalam minyak sawit, (2) Second Grade; pada industri bibit, dan (3) Polymelical mengubah sawit menjadi bahan parfum dan sabun. Beliau menekankan khususnya pada sawit, bahwa daya saing, kepercayaan menjadi faktor utama. Beliau berharap, masyarakat Provinsi Riau dapat berfikir multi produk tidak hanya terbatas pada main product, selain itu bargaining position juga perlu dilakukan lebih baik. Beliau juga mengusulkan adanya “wisata sawit” pada saat pohon sawit berbunga. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan sumber pendapatan Provinsi Riau.

Pada akhir arahnya, Ketua Umum PP PERHEPI mengadakan sayembara menulis tentang “Re-Branding/ Positioning dari Perkebunan Provinsi Riau”. Produk harus dapat menarik pasar domestic maupun Internasional, termasuk fokus pada kemasannya agar dapat dijual ke pasar Internasional. Sebagai hadiah untuk penulis terbaik akan diundang ke Jakarta, diberikan tiket pesawat, akomodasi, uang saku serta menginap di Jakarta selama 3 (tiga) hari. Selain itu, pemenang juga akan diberikan pelatihan 1 (satu) hari di PPEI tentang ekspor Indonesia, berkunjung ke Laboratorium Pengujian Mutu Kementerian Pertanian serta berkesempatan untuk berkunjung ke Kampus IPB serta berdiskusi dengan mahasiswa IPB terkait topik tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari sayembara tersebut, Ketua Umum PP PERHEPI akan mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Riau untuk meminta dukungan pemberangkatan mahasiswa Universitas Riau sebanyak 5 (orang) yang diharapkan dapat dibiayai oleh Pemprov Riau ke Jakarta. Sedangkan 5 (lima) orang penulis terbaik akan dibiayai oleh PERHEPI. Sehingga total pemenang sejumlah 10 (sepuluh) orang.

Semoga kegiatan ini akan dapat menjadi stimulus bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. (ik)



14 Ketua Umum PP Perhepi pada Kuliah Umum Mahasiswa S1 Universitas Islam Riau

UIR, Riau, 4 Juli 2012, di sela kunjungan Ketua Umum PP PERHEPI pada acara Simnas "Peningkatan daya saing dan keberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan di Indonesia" yang dilaksanakan di Universitas Riau, Ketua Umum menyempatkan untuk memenuhi undangan Universitas Islam Riau (UIR) memberikan kuliah umum di hadapan 210 orang mahasiswa S1 yang baru saja menyelesaikan ujian akhir semesternya. Kuliah umum dibuka oleh Purek III Universitas Islam Riau, Bpk. Ir. Tengku Iskandar Johan.

Pada pertemuan singkat tersebut, Ketua Umum PP PERHEPI melontarkan pertanyaan "mengapa menjadi mahasiswa UIR?". Beliau berpesan agar mahasiswa harus mengetahui apa yang akan dituju melalui perkuliahan tersebut. Beliau mencontohkan beberapa tokoh entrepreneur yang memulai usahanya dari hal kecil, tidak pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya kemudian karena keteguhannya menjadi sukses karena keteguhannya.

Contohnya adalah Kolonel Sanders (KFC) yang telah mengalami kegagalan sebanyak 1362 kali saat menjajakan ayam goreng dengan bumbu rahasianya saat ini telah memiliki 9000 cabang di 60 negara, Bpk. Sosro (Teh Botol) mengemas teh di dalam botol, serta Bpk. Tirta Utomo (Aqua) mengemas air di dalam botol kaca sejak tahun 1974, dan yang terakhir Bpk. Nadjikh (PT. Kelola Mina Laut) memulai dari keinginan untuk memanfaatkan ikan teri saat ini telah mencapai omset diatas US \$ 100 juta.

Diakhir kuliah umum, untuk menyemangati mahasiswa UIR sekaligus sebagai hadiah ulang tahun yang ke 50thn UIR, beliau kembali mengundang penulisan artikel dengan tema "Mengapa Saya menjadi Mahasiswa UIR". Tulisan dibuat dalam 1 (satu) halaman A4 dengan besar font 12 spasi 1 ½. Seluruh tulisan akan dinilai sendiri oleh Ketua Umum PP Perhepi dengan mengirimkan ke alamat email beliau di ybkrisna@yahoo.com. 3 (tiga) tulisan terbaik akan mendapatkan masing-masing Rp. 2.5 juta rupiah paling lambat diterima sebelum 17 ramadhan (penetapan ramadhan menunggu pengumuman pemerintah). Kemudian pemenang akan diumumkan setelah hari raya idul fitri.

Menutup kuliah umum, beliau berpesan bahwa untuk meraih sukses ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan; (1) harus memiliki kemampuan yang "lebih" dari orang lain, (2) harus memiliki jejaring/network, (3) harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, dan (4) dapat menjaga integritas/amanah.

Mengutip perkataan Bung Karno Ketua Umum PP PERHEPI berpesan "Gapai Cita-citamu sebagai bintang". (ik)

15 Agenda PERHEPI

*T= Tentative

Catatan
Organisasi :

Bogor,
5 Mei 2012

Komisariat Daerah yang telah ditetapkan kembali kepengurusannya: 22 Komda (Bogor, Surabaya, Bandung, Purwokerto, Medan, Palembang, Jambi, Riau, Kendari, Pontianak, Mataram, Makasar, Yogyakarta, Malang, Bandar Lampung, Bangkalan, Surakarta, Jember, Jakarta, Bengkulu, Probolinggo dan Samarinda). Masih terdapat 13 Komisariat Daerah yang sudah tercatat tetapi belum melakukan rekonfirmasi ulang kepengurusannya. Anggota Perhepi yang telah terdata ulang: 736 orang (Mahasiswa 1,5%, Sarjana 12,6%, Master/Magister/S2 57,1%, Doktor/Profesor/S3 28,8%). Penerima "E-News Perhepi"/ network Perhepi: 938 alamat email ((Mahasiswa 52,7%, Sarjana 13,13%, Master/Magister/S2 19,51%, Doktor/Profesor/S3 14,39 %).

HUBUNGI KAMI

Pengelola PERHEPI E-NEWS

Redaksi : Erizal Jamal, Ronnie S. Natawidjaja,
Feryanto, Achmad Fadilah, Ika W

Lay Out : Habibie Yukezain

Telepon./Faks. : 0251-8422953

E-mail : perhepi.news@gmail.com

Twitter : @perhepi

URL : www.perhepi.org

2012

	Januari	
KOMDA Surabaya	• 11-12	Simposium Nasional Ekonomi Gula di UPN "Veteran" Jawa Timur dan soft launching web : www.perhepi.org , Surabaya.
PP PERHEPI	• 11	Rapat Kerja PERHEPI, membahas Program Kerja 2012; Surabaya.
	Februari	
KOMDA Purwokerto	• 9	Pengukuhan Komda Purwokerto, Purwokerto.
KOMDA Kendari	• 11	Pengukuhan KOMDA Kendari dan Pengukuhan Pengurus Baru Komda Kendari, Kendari.
KOMDA Kendari	• 11	Penandatanganan Mou antara PERHEPI dengan Universitas Haluleo tentang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kendari.
KOMDA Bandung	• 16	PERHEPI menjadi organisasi pendukung International Conference On Small Farmers Agency in Globalized Market, bekerja sama dengan Universitas Padjajaran, Bandung.
KOMDA Bandung	• 16	Penandatanganan MoU antara PERHEPI dengan Universitas Padjajaran tentang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Bandung.
PP PERHEPI	• 28	Kunjungan mahasiswa pemenang LKTI Simposium Ekonomi Gula Komda Surabaya bersama pengurus/anggota PERHEPI ke Thailand (Perhepi Sugar Thai Tour) bekerja sama dengan Kadin Indonesia, Thailand, 28 Feb – 3 Maret 2012
	Maret	
KOMDA Jogja	• 26-27	Simposium nasional (SimNas): Reformasi Agraria, Otda Kedaulatan pangan dan Ekonomi Bangsa, Yogyakarta
KOMDA Jambi	• 28	Pengukuhan kembali PERHEPI KOMDA Jambi, Jambi.
KOMDA Jambi	• 29	Simposium Nasional Ekonomi Karet di Universitas Jambi. Jambi.
KOMDA Jambi	• 29	Penandatanganan MoU antara PERHEPI dan Universitas Jambi tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Jambi.
	April	
KOMDA Bogor	• 23	Launching Buku Pangan Rakyat : Soal Hidup atau Mati 60 tahun kemudian (peringatan 60thn Peletakan Batu Pertama Pendirian Kampus IPB Baranangsiang), Wisma Proklamasi-Jakarta
KOMDA Bogor	• 23	Studium Generale dan Seminar Mahasiswa (S1-S2-S3) Refleksi Pangan Rakyat: Soal Hidup Atau Mati 60 Tahun Kemudian, Auditorium Andi Hakim Nasoetion-Kampus IPB Darmaga IPB
	Mei	
KOMDA Jogja	• 7	SimNas Beras dan Dies Natalis MMA UGM, Yogyakarta
	Juni	
KOMDA Palembang	• 5- 6	Seminar Nasional Pengembangan Agribisnis Pangan melalui Pemanfaatan Lahan Sub Optimal, Palembang. Rapat Kerja Nasional Tengah Tahunan Pengurus Pusat PERHEPI
KOMDA Bangkalan	• 27	Seminar Nasional Peningkatan daya saing pertanian Indonesia, Univ. Trunojoyo, Madura
	Juli	
KOMDA Pekanbaru	• 4-5	Simposium "Peningkatan daya saing dan keberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan di Indonesia Pengukuhan PERHEPI Komda Pekanbaru
	Agustus	
	• *T	International Seminar yang diselenggarakan oleh Univ. Maastricht Netherland dan Komda PERHEPI Bandar Lampung
	September	
	• 4-5	Simposium Nasional Ekonomi Jagung, Universitas Hasanudin, Makassar.
KOMDA Bengkulu	• 7-8	Tentative - Penanaman 10.000 pohon jati dan 1000 pohon buah serta pengukuhan Komda Probolinggo (bersamaan dgn penerimaan mahasiswa baru)
KOMDA Bandung	• 11-12	Pengukuhan Komda Bengkulu dan SemNas
KOMDA Purwokerto	• 14	Simposium Nasional Rantai Pasok Multikultura dan Peran Koperasi, Universitas Padjajaran, Bandung
KOMDA Probolinggo	• 19	Seminar Nasional Ekonomi Pangan dan Dies Natalis ke-50 Faperta Unsoed, Purwokerto
	Oktober	
KOMDA Kendari	• 8-9	SimNas Ekonomi Kakao, Universitas Haluleo, Kendari.
	November	
KOMDA Jember	• 10-13	Simposium Nasional Ekonomi Kopi, Universitas Jember.
KOMDA Malang	• 27-28	International Conference "Diversifikasi Pangan", Universitas Brawijaya, Malang (Dalam rangka Dies Natalis Ulang Tahun Emas 50 thn UB)
	Desember	
KOMDA Bali	• *T	Simposium Nasional Ekonomi Kelapa Sawit, Denpasar.
	2013	
	Januari	
KOMDA Solo	• *T	Simposium Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pertanian dan Rapat Kerja Pengurus PERHEPI, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
	Desember	
KOMDA Bogor	• *T	International Conference on Agricultural Economics, Bogor.
	Juli	
	• *T	Konpernas XVII dan Kongres XVI PERHEPI, pemilihan pengurus baru.

2014